

Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji pada KUA Kecamatan di Kota Padang

Rasyidul Basri

Balai Diklat Keagamaan Padang,

Email: rasyidulbasri@gmail.com

Naskah diterima redaksi tanggal 29 Juni 2015, diseleksi 15 Juli dan direvisi 29 Juli 2015

Abstract

This research applies survey and descriptive method with quantitative and qualitative approach. This research aims to figure out the effectiveness, supporting and inhibiting factors in conducting Hajj Manasik guidance at sub-District Religious Affairs Office in Padang in 2014. The sample is 100 of 929 participants from 10 sub-District Religious Affairs Offices consisting of head of sub-District Religious Affairs Office/ committee, head of Hajj and Umrah department, head of Padang Religious Affairs Office and Hajj participants. The results show that the guidance Hajj Manasik implementation 2014 in Padang City is effective in manager level while management, programs, and infrastructure need to be developed. It can be seen on the achievements of the management indicator: 75.55% manager indicator, 71.72% management indicator, 67.85% program indicator, and 69.43% infrastructure indicator. Recommendation is for General Director of Hajj and Umrah through West Sumatera Religious Affairs Office to issue the latest Religious Minister decree containing sub-District Religious Affairs Office's tasks as a Hajj consultant at sub-district level and give a service on marriage and reconciliation.

Keywords: Effectiveness, the implementation of Guidance Hajj Manasik, Sub-District Religious Affairs Office

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode survei dan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas, faktor-faktor pendukung, dan penghambat pelaksanaan bimbingan manasik haji KUA Kecamatan di Kota Padang pada tahun 2014. Sampel penelitian sebanyak 100 orang yang diambil dari peserta sebanyak 929 orang pada 10 KUA Kecamatan dengan komposisi Kepala KUA/Panitia Kecamatan, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, dan calon jamaah haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh KUA Kecamatan di Kota Padang tahun 2014 pada indikator pengelola dikategorikan efektif, sementara pengelolaan, program, dan sarana prasarana masih belum efektif. Hal itu terlihat pada capaian indikator pengelola sebesar 75,55%, pengelolaan 71,72%, program 67,85%, dan sarana prasarana 69,43%. Adapun rekomendasi kepada Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat untuk menerbitkan Peraturan Menteri Agama terbaru yang berisikan tugas KUA sebagai konsultan haji di tingkat kecamatan selain melayani nikah dan rujuk.

Kata kunci: Efektivitas, Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji, KUA Kecamatan.

Pendahuluan

Pembekalan calon jamaah haji dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan merupakan tugas pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Agama RI yang berwenang sebagai penyelenggara ibadah haji. Lembaga itu berkewajiban memberikan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan ibadah haji. Undang-undang Nomor 13 Pasal 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji terkandung pernyataan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan jamaah haji.

Seharusnya, KUA Kecamatan sebagai lembaga terdepan Kementerian Agama RI menjadi pelaksana bimbingan manasik haji yang dapat diandalkan bagi calon jamaah haji di wilayah kecamatan. Bimbingan manasik haji merupakan salah satu tahapan pembinaan calon jamaah haji yang bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat melaksanakan ibadah secara mandiri, baik, dan benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Namun, lembaga tersebut hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, dan pelaksanaan nikah dan rujuk (Peraturan PMA Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan). Namun demikian, meskipun tidak dinyatakan dengan tegas pada PMA, sejak tahun 2006 sampai sekarang, KUA Kecamatan telah melaksanakan bimbingan manasik haji. Sayangnya, bimbingan manasik jamaah haji itu seringkali diabaikan atau tidak dianggap penting oleh calon jamaah haji. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Syaukani pada tahun 2011 menyebutkan sebuah fakta

bahwa bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan dinilai buruk oleh responden.

Berdasarkan kasus inilah, peneliti melakukan observasi terhadap bimbingan manasik haji yang diselenggarakan KUA Kecamatan di bawah koordinasi Kantor Kementerian Agama Kota Padang pada tanggal 24 s.d. 30 Juni 2014 dengan jumlah peserta 988 orang di 10 KUA Kecamatan dari jumlah keseluruhan kecamatan di Kota Padang yakni 11 kecamatan. 1 kecamatan tersebut tidak melaksanakan kegiatan karena pertimbangan jumlah jamaah yang sedikit.

Hasil observasi mengenai kehadiran peserta pada kegiatan manasik haji sangatlah bervariasi. Hari pertama diikuti sekitar 75%, lalu hari berikutnya berkurang menjadi 60-50% dari seluruh jumlah calon jamaah. Padahal dalam tata tertib disebutkan bahwa jumlah peserta yang hadir semestinya tidak berkurang karena diharuskan setiap peserta mengikuti kegiatan sampai selesai. Fenomena itu menunjukkan bahwa ada yang belum efektif dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan walaupun pelatihan itu diberikan secara gratis kepada mereka. Uniknya, mereka lebih memilih bimbingan manasik yang diselenggarakan oleh KBIH dengan bayaran 1 s.d. 2,5 juta di luar setoran dana BPIH.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh KUA Kecamatan di Kota Padang? Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh KUA Kecamatan di Kota Padang.

Selanjutnya, berdasarkan studi pustaka yang peneliti lakukan, sejauh ini belum ada penelitian mengenai masalah bimbingan manasik haji oleh KUA

Kecamatan di Kota Padang. Beberapa penelitian ilmiah tentang masalah per-haji-an hanya meliputi: "Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik" pada tahun 2007, "Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia" pada tahun 2009, "Pelayanan Haji Dalam Sorotan Publik Jilid 2 untuk Wilayah Timur" yang dilakukan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makasar pada tahun 2013.

Kerangka Teori

Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan manajemen yang telah dikaitkan dengan hasil kerja, sasaran, dan target yang diharapkan (Anorega, 2000:178). Sedangkan istilah *bimbingan* berarti proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan, rencana, dan interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik (Prayitno, 2004:94). Kemudian, istilah *manasik* berasal dari bahasa Arab dengan bentuk kata dasar *nusuk* yang berarti ibadah, bakti kepada Allah, (Yunus, 1995:450). Ali (2004:283) mengemukakan bahwa kata "haji" dalam bahasa Arab bermakna mengunjungi sesuatu. Artinya, manasik haji dalam kegiatan ibadah haji dilakukan dengan cara mendatangi Baitullah di Mekkah sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan seseorang hamba kepada khalik-Nya.

Menurut Baidhowi (2006:3), pembinaan merupakan tahapan bimbingan terhadap calon jamaah haji yang dilaksanakan di tanah air dan di Arab Saudi. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012, Pasal 15 dan 16 menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada jamaah haji mulai dari sebelum keberangkatan,

selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi sampai dengan proses kepulangan ke Indonesia. Bimbingan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tatap muka di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten/kota.

Dalam hal ini, program Kementerian Agama RI memberikan bimbingan manasik haji sebelum calon jamaah haji berangkat ke Mekkah bertujuan agar calon jamaah ketika berada di tanah suci tidak merasa kaget dan ragu ketika melaksanakan ibadah haji. Dirjen PHU (2009:1) pun menjelaskan bahwa bimbingan manasik haji dimaksudkan agar jamaah dalam melaksanakan ibadah haji sesuai dengan alur sehingga mereka benar melaksanakan kegiatan ibadah itu. Bimbingan manasik haji dapat mempersiapkan jamaah yang *isthitha'*, dengan cara memberikan pembekalan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap selama pelaksanaan ibadah haji.

Indikator Efektivitas

Indikator efektivitas bimbingan manasik haji menyangkut pengelola, pengelolaan, program, dan sarana prasarana. Jika keempat indikator itu berfungsi maka akan tampak langkah pencapaian tujuan, peran sistem dan sub sistem, serta sumber daya manusia sebagai pelaku yang memiliki potensi penggerak kegiatan organisasi. Di samping itu, pencapaian tujuan dan sasaran pembelajaran yang sesuai dengan keinginan semua pihak di dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, pengelola, pengelolaan, program, dan sarana prasarana merupakan variabel bebas sedangkan tujuan, peran sistem, sub sistem, dan SDM merupakan variabel terikat.

Siswanto (1990:18) menyebut

bahwa pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan pekerjaan tertentu yang telah diprogramkan dengan hasil yang memuaskan. Di samping berperan sebagai manajer, pengelola juga bertanggungjawab atas aktivitas dan hasil kerja bawahannya. Pengelola yang profesional menurut Khailani (2008:30) adalah kondisi seseorang yang benar-benar memiliki keahlian dan keterampilan serta sikap mental yang terpuji sehingga perbuatan dan pekerjaannya berada dalam kondisi yang terbaik dari penilaian semua pihak.

KUA sebagai suatu organisasi atau unit terdepan dari Kementerian Agama RI pada dasarnya memiliki daya atau kemampuan untuk menciptakan yang terbaik atau disebut dengan istilah *consumer surplus*. *Consumer surplus* adalah kepuasan yang dicapai atau dirasakan oleh pemberi jasa melebihi harapan yang diinginkan oleh konsumen (Winardi, 2004:65). Semakin tinggi tingkat *consumer surplus* suatu organisasi, maka semakin tinggi pula daya tahan hidup organisasi yang bersangkutan, karena semakin dibutuhkan oleh konsumen. Seiring dengan pemikiran tersebut yang memosisikan KUA Kecamatan dan Kementerian Agama RI sebagai organisasi atau lembaga penyedia manfaat, bagi calon jamaah haji dan sebagai *customer surplus* mereka bersedia mengeluarkan biaya untuk memenuhi keinginan demi mendapatkan kepuasan

Dengan kondisi demikian, KUA Kecamatan yang bertugas sebagai pengelola bimbingan manasik haji sejatinya harus memahami keinginan

masyarakat pengguna jasanya sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Kementerian Agama RI. Dalam konteks ini pula, Yulius (2007:37-38) mengemukakan bahwa karakteristik kepemimpinan Kepala KUA Kecamatan harus mempunyai nilai-nilai yang tumbuh dari visi dan misi Kementerian Agama, antara lain: keimanan dan ketaqwaan, ikhlas beramal, semangat sebagai pejuang, sederhana, pantang menyerah, pelayan masyarakat, semangat bekerja sebagai ibadah.

Selanjutnya terkait dengan pengelolaan, kata ini dimaknai sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan kegiatan kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Siswanto (1999:31) mengungkapkan komponen pengelolaan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian. Di samping pengelola dan pengeloan, aspek yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya program yang jelas. Menurut Siagian (1994:189), program haruslah merupakan kumpulan proyek-proyek yang telah dirancang agar kegiatan yang dilaksanakan harmonis dan terintegrasi sehingga program tersebut membuat sasaran dapat tercapai secara keseluruhan.

Program bimbingan manasik haji oleh KUA Kecamatan ini, jika merujuk kepada petunjuk Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama dalam surat dengan Nomor DT.VII/I/HJ.01/1472/2013 tertanggal 20 Mei 2013 jelas terlihat sebagaimana tertulis pada tabel berikut.

Tabel 1.
Program Bimbingan Manasik Haji KUA Kecamatan

No	Materi	Pokok Bahasan	Metode
1.	Pertemuan ke-1 Bimbingan Perjalanan Ibadah Haji Bimbingan Kesehatan Haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan sebelum berangkat ke asrama haji embarkasi 2. Kegiatan di asrama haji 3. Kegiatan selama di pesawat 4. Kegiatan di bandara Arab 5. Kegiatan diperjalanan menuju pemondokan 6. Kegiatan dipondokan Makkah/Medinah 7. Kegiatan Arafah, Mudzalifah, Mina <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan jamaah haji di tanah air dan Arab Saudi 2. Jenis obat yang boleh dibawa ke tanah suci 3. Penangan dini terhadap jamaah risti 4. Asuransi bagi jamaah dan petugas haji 	Ceramah, Tanya Jawab, Simulasi (CTS)
2.	Pertemuan ke-2 Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika dan akhlakul karimah selama pelaksanaan ibadah haji 2. Pengertian haji ifrad, tamattu', dan qiran. 3. Macam-macam DAM 4. Pelaksanaan Shalat Arbain 	CTS
3.	Pertemuan ke-3 Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji/Umarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpakaian dan Shalat Sunat Ihram 2. Niat dan bacaan Talbiyah 3. Thawaf 4. Sai 5. Tahalul 	CTS
4.	Pertemuan ke-4 Bimbingan pelaksana-naan ibadah haji/ umrah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktek memakai pakian ihram 2. Praktek niat dan shalat sunat ihram 3. Praktek tawaf, sai, dan tahalul 	CTS
5.	Pertemuan ke-5 Bimbingan pelaksanaan ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ihram/miqat 2. Wukuf di Arafah 3. Mabid di Muzdalifah 4. Mabid di Mina 5. Melontar jamarat 6. Thawaf ifadhah 7. Tahalul awal dan tsani 	CTS
6.	Pertemuan ke-6 Bimbingan pelaksanaan ibadah haji.	Praktek memakai pakaian ihram Praktek niat dan Shalat Arbain Praktek wukuf, mabid mudzalifah, dan mina Praktek melempar jamarat Praktek tawaf ifadhah Praktek tahalul/memotong rambut	CTS
7.	Pertemuan ke-7 Ibadah dan kegiatan selama di dalam pesawat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersuci (wudhu/tayamum di pesawat) 2. Shalat di pesawat 3. Makan dan minum di pesawat 4. Membaca al-Qur'an, dzikir, dan do'a 5. Tata cara menggunakan fasilitas di atas pesawat 	CTS

Sumber: Juknis Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji tahun 2013

Aspek terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah sarana dan prasana yang tersedia. Menurut Yusak (2002:15), salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama dari setiap administrator adalah sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana merupakan semua alat/media yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran atau bimbingan sedangkan prasarana mencakup lahan, bangunan gedung, dan tempat berlangsung kegiatan bimbingan berguna untuk peningkatan mutu dan relevansi layanan yang disediakan. Menurut Iskandar Idy (2007:13), kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan yang harus disediakan sebagai berikut: tempat pertemuan dan perlengkapannya, *white board*/papan tulis berikut spidol, kapur, dan penghapus, *Flip chart* "menuju haji mabrur", OHP beserta lampu cadangan, transparan OHP, alat peraga kabah mini, mas'a, dan patung peragaan, pengeras suara (*sound system*), *infocus*, dan film proses perjalanan haji.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method*, yakni pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode survei digunakan untuk menemukan besaran nilai efektifitas sedangkan metode deskriptif digunakan untuk memaknai besaran nilai yang diperoleh berdasarkan survei. Menurut Arikunto (2001:94) penelitian dengan menggunakan metode *survei* dilakukan dengan cara data dikumpulkan dari sejumlah sampel/populasi untuk mewakili seluruh populasi yang ada. Jenis survei yang dipakai ialah *Cross-Sectional Surveys* di mana pengumpulan data dilakukan dalam satu waktu pengambilan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami hasil deskripsi respon calon jamaah

haji terhadap pelaksanaan bimbingan manasik haji pada KUA Kecamatan di Kota Padang.

Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 1 Maret s.d. 30 Mei 2014. Calon jamaah haji yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah peserta bimbingan manasik haji pada tahun 2014 dengan pemilihan lokasi di lingkungan kerja KUA Kecamatan Kementerian Agama Kota Padang yang menyelenggarakan bimbingan manasik haji.

Populasi dalam penelitian adalah seluruh jamaah pada 10 KUA Kecamatan yang ikut bimbingan manasik haji di Kota Padang pada tahun 2014 dengan jumlah sebanyak 988 orang. Sedangkan Sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian diambil sesuai dengan teknik pengambilan sample data Kuantitatif. Gay (2009:176) mengemukakan jika populasi berkisar 1000 atau kurang, maka yang akan dijadikan sampel adalah 10% dari populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Klasifikasi responden dibagi dua jenis: *Pertama*, responden yang berjumlah 50 orang dengan kriteria mengikuti bimbingan manasik haji sampai selesai mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 (Lihat Tabel 1). *Kedua*, responden sebanyak 50 orang yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji sampai selesai. Tidak mengikuti kegiatan sampai selesai maksudnya adalah responden yang tidak mengikuti pelatihan mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Apabila satu pertemuan saja tidak diikuti maka dianggap sebagai responden kriteria kedua. Namun demikian, responden yang tidak mengikuti pelatihan sampai selesai karena sakit atau berhalangan datang tidak dimasukkan dalam kriteria kedua ini.

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data

yang diperoleh dari calon jamaah haji yang mengikuti bimbingan manasik pada 10 KUA Kecamatan di Kota Padang. Sedangkan data sekunder atau data penunjang adalah berupa dokumentasi, literatur, tulisan pada *website*. Semua sumber data itu akan dipergunakan untuk memperkuat analisis yang akan diuraikan pada pembahasan.

Selanjutnya, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu menyebarkan kuesioner dan wawancara. Kuesioner diberikan kepada responden untuk diisi secara objektif menurut apa yang mereka alami. Pertanyaan dalam angket disusun berdasarkan indikator keberhasilan dalam bimbingan manasik haji yang dilampirkan pada bagian akhir laporan penelitian. Sedangkan wawancara bertujuan untuk menguatkan akurasi data yang diperoleh dari kuesioner.

Data yang diperoleh melalui angket dan daftar isian akan dianalisis dengan mengukur indeks respon jamaah dengan skala *likert* sebagai berikut: kategori *sangat efektif* bernilai 4, *efektif* bernilai 3, *kurang efektif* bernilai 2, dan *tidak efektif* bernilai 1. Kemudian, nilai dihitung menggunakan rumus (Brammen; 2005:9-10) berikut.

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan:

\bar{x} = Nilai rata-rata

$\sum x$ = Skor total dari jawaban angket

n = Jumlah responden

Selanjutnya, persentase dari setiap item akan dinilai dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{n} \times 100\%$$

P adalah nilai persentase yang akan dicari, F adalah frekuensi dari satu item pertanyaan dan n adalah

jumlah responden. Selanjutnya, hasil penghitungan akan dikonversi dengan rentangan nilai dalam tabel berikut.

Tabel 2
Rentangan Nilai dalam Penelitian

Rentangan	Tingkat Capaian	Deskripsi
3.01-4.00	86%-100%	Sangat Efektif
2.01-3.00	76%-85%	Efektif
1.01-2.00	56%-75%	Kurang Efektif
0.01-1.00	< 55%	Tidak Efektif

Data dianalisis menggunakan teknik analisis kuantitatif dilanjutkan dengan penafsiran kualitatif. Data yang bersifat kuantitatif diolah dengan teknik statistika deskriptif. Setelah mendapatkan gambaran, data kuantitatif diolah dengan analisis kualitatif model interaktif dengan tahapan: seleksi dan reduksi data, klasifikasi dan *display* data, lalu interpretasi dan kesimpulan (Brammen, 2005:9).

Pembahasan

Jumlah peserta bimbingan manasik haji yang dilaksanakan KUA Kecamatan se-Kota Padang adalah: Padang Timur sebanyak 117 orang, Padang Barat sebanyak 60 orang, Padang Utara sebanyak 105 orang, Padang Selatan sebanyak 54 orang, Kota Tengah sebanyak 254 orang, Nanggalo sebanyak 78 orang, Kuranji sebanyak 128 orang, Pauh sebanyak 44 orang, Lubuk Begalung sebanyak 99 orang, Lubuk Kilangan sebanyak 45 orang sehingga total keseluruhan adalah 929 (*Sumber Data: Laporan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Kemenag Kota Padang tahun 2014*).

Pengelola

Berdasarkan hasil analisis deskripsi kuantitatif yang diuraikan sebelumnya

keseluruhan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh 10 KUA Kecamatan di Kota Padang belum efektif. Hal itu didasarkan pada tingkat capaian nilai responden yang diperoleh kurang dari 80%. Data indikator pengelola diperoleh dengan rata-rata nilai sebesar 3,02 dengan tingkat capaian responden sebesar 75,48%. Jumlah itu dikategorikan kurang efektif. Pelaksanaan kegiatan itu masih memerlukan upaya peningkatan kinerja pengelola sehingga mencapai kriteria efektif.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kinerja pengelola dan panita agar lebih profesional. Pengelola sebagai aparat Kementerian Agama RI seharusnya mempunyai semangat kerja sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada visi dan misi Kementerian Agama RI. Dalam hal ini, hal yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana meningkatkan motivasi dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan seperti berikut: a). Meningkatkan kompetensi manajerial melalui program Pendidikan dan Pelatihan (diklat); b). Mengaplikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam visi dan misi Kementerian Agama RI di setiap KUA Kecamatan; c). Memberikan porsi lebih banyak kepada Kepala KUA Kecamatan sebagai petugas yang menyertai jamaah atau petugas kloter setiap tahunnya; d). Pembinaan jamaah haji ditetapkan menjadi bagian tugas pokok KUA Kecamatan; dan e). Membentuk dan menetapkan jabatan baru yaitu fungsional konsultan penyelenggaraan haji di tingkat kecamatan.

Pengelolaan

Dalam hal pengelolaan, berdasarkan data hasil jawaban dari indikator pengelolaan diperoleh nilai rata-rata

sebesar 2,63 dengan tingkat capaian responden sebesar 65,84%. Besaran nilai itu mengindikasikan bahwa pengelolaan pada bimbingan manasik haji pada KUA Kecamatan di Kota Padang tahun 2013 belum efektif. Ada beberapa hal dari aspek pengelolaan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan berkaitan dengan tidak efektifnya pengelolaan bimbingan manasik haji itu.

Data yang diperoleh dari penelitian ini sebetulnya memperlihatkan bahwa para Kepala KUA sudah berupaya maksimal melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan pedoman yang instruksikan. Akan tetapi, karena dana dan juklak yang diberikan oleh pihak terkait terlambat, hal itu berakibat terhadap pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan. Keterlambatan itu terjadi karena persoalan birokrasi. Oleh karena itu, menurut Peneliti, untuk meningkatkan kinerja KUA Kecamatan dapat dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada KUA Kecamatan untuk menyelenggarakan bimbingan manasik haji lebih awal dari KBIH dan pihak terkait harus segera mencairkan dana kegiatan.

Program

Nilai rata-rata penyebaran kuesioner sebesar 2,65 dengan tingkat capaian responden sebesar 66,35%. Besaran nilai itu mengindikasikan bahwa komponen program bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh 10 KUA Kecamatan di Kota Padang pada tahun 2013 belum efektif. Peserta menyatakan bahwa program bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan kurang efektif, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Misalnya, kegiatan itu dilaksanakan hanya 7 kali pertemuan dan Kabupaten/Kota sebanyak 3 kali

pertemuan. Pembelajaran dipadatkan, tidak ada pertemuan untuk pengulangan materi. Materi bimbingan yang dibelajarkan sebagai berikut.

Hal ini berbeda dengan bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh KBIH yang sudah berlangsung sejak 5 bulan sebelumnya dengan

Tabel 14
Materi Bimbingan Manasik Haji KUA Kecamatan

No	Jam	Materi	Pokok Bahasan
1.	Hari ke 1 08-10.00 10-12.00	Pembukaan	
		Perjalanan Ibadah haji	a. Prosedur perjalanan ibadah haji b. Hak dan kewajiban jamaah c. Pelayanan di asrama haji dan tanah suci
2.	Hari ke 2 08-12.00	Ketentuan manasik haji	a. Pengertian haji dan umrah b. Syarat, rukun, dan wajib haji dan umrah
3.	Hari ke 3 08-12.00	Manasik ibadah haji	a. Shalat Arbain b. Ziarah di kota Mekkah dan Medinah c. Kondisi sosial budaya bangsa arab
4.	Hari ke 4	Manasik ibadah haji	a. Mabit muzdalifah dan mina b. Melontar jamarat c. Tahalul awal dan tsani d. Nafar awal dan tsani
5.	Hari ke 5	Manasik ibadah haji	a. Miqat, ihram, talbiyah b. Tawaf, sai, umrah, ifadhah, sunat dan wada c. Wukuf di arafah d. Dam
6.	Hari ke 6	Kesehatan ibadah haji	a. Akhlak, hikmah haji dan umrah b. Pelestarian haji mabrur
7.	Hari ke 7	Praktek	a. Praktek haji b. Praktek umrah

Sumber: Laporan Bimbingan Manasik Haji KUA Kecamatan Padang Timur tahun 2013

Dari tabel tersebut terlihat bahwa materi pembelajaran dan ketersediaan waktu yang dialokasikan lebih sedikit jika dibandingkan dengan rencana program yang telah didesain oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Di samping itu, pelaksanaan bimbingan manasik bagi calon jamaah haji dilakukan serentak oleh KUA Kecamatan se-Kota Padang pada tanggal 24 s.d. 30 Juni tahun 2014 sehingga waktu pelaksanaan bimbingan manasik hanya 7 kali pertemuan. Dengan demikian, setiap materi disajikan hanya dalam satu waktu, tanpa ada pengulangan sesudahnya.

program belajar 2 kali dalam seminggu. Program bimbingan manasik KBIH yang berlangsung lama dan materi dibelajarkan berulang kali membuat calon jamaah haji lebih menguasai materi.

Di samping itu, mereka menjadi lebih akrab dengan guru pembimbing. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis data dari wawancara, diperoleh rumusan solusi guna merevitalisasi kinerja KUA Kecamatan dalam bimbingan calon jamaah haji khususnya dalam pelaksanaan program, yakni sebagai berikut:

Kegiatan bimbingan manasik haji dengan jumlah tatap muka 7 kali

pertemuan perlu ditinjau ulang kembali. Alokasi waktu 7 kali pertemuan dan materi pembelajaran yang padat menyebabkan calon jamaah haji sukar menguasai materi dan praktek bimbingan manasik secara mendalam. Cara demikian mustahil mencapai target yang diharapkan untuk mempersiapkan calon jamaah mandiri dalam melaksanakan ibadahnya;

Pelaksanaan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan sebaiknya tidak dilakukan pada hari-hari kerja, tetapi dilakukan pada hari libur, seperti hari Sabtu atau Minggu;

Kriteria narasumber harus yang memiliki sertifikat sebagai pelatih, bukan hanya jamaah haji yang telah selesai menunaikan ibadah haji saja.

Sarana dan Prasarana

Sesuai dengan hasil penilaian responden terhadap indikator sarana dan prasarana dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan, skor yang didapatkan adalah nilai rata-rata sebesar 2,53 dengan tingkat capaian responden sebesar 63,15%. Besaran nilai itu mengindikasikan bahwa sarana dan prasarana manasik haji yang dilaksanakan KUA Kecamatan di Kota Padang pada tahun 2014 belum efektif.

Berdasarkan data tersebut, penyebab calon jamaah haji memberikan respon belum efektif karena sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sarana dan prasarana yang digunakan masih status pinjaman baik ruangan belajar maupun sarana pendukung lainnya, seperti *sound system*, *warless*, *white board*, *infocus*, dan sebagainya. Untuk itu, pihak terkait perlu menyiapkan anggaran yang ditetapkan dari Kementerian Agama RI untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan sehingga meningkatkan martabat KUA Kecamatan khususnya

dan Kementerian Agama RI umumnya. Di lain pihak, masyarakat pun akan mendapatkan pelayanan prima sebagai wujud dari sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama dalam era transparansi dan akuntabilitas pada sekarang ini.

Penutup

Bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan khususnya di Kota Padang pada tahun 2014 belum efektif. Peserta jamaah haji lebih memilih bimbingan manasik KBIH daripada yang dilaksanakan KUA Kecamatan disebabkan beberapa hal berikut: *Pertama*, pihak pengelola terutama KUA kurang percaya diri untuk menyelenggarakan kegiatan itu karena belum mendapatkan diklat secara profesional. Apalagi, tugas tersebut hanya tugas tambahan semata bukan termasuk dalam tugas pokok. *Kedua*, pelaksanaan bimbingan manasik haji terlambat. Hal itu disebabkan oleh juklak dan juknis serta keterlambatan penyaluran anggaran penyelenggaraan dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama kepada KUA Kecamatan. *Ketiga*, jumlah pertemuan hanya 7 kali yang seharusnya 13 kali. Jika jumlah pertemuan banyak maka sangat dimungkinkan untuk dilakukannya pengulangan materi sehingga peserta lebih paham. Hal itu akan berdampak untuk membangun sikap mandiri ketika jamaah sudah berada di Mekkah. *Keempat*, sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan memadai. Sarana dan prasarana yang digunakan KUA Kecamatan masih status pinjaman dari lembaga lain. Oleh karena itu, pemerintah harus menambah alokasi dana untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Bedjo, Siswanto. *Manajemen Modern*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Brammen, Julia. *Mixing Method Qualitative and Quantitative Research*, (Terj. Nakhiah Afrawi.) et, all: *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Tim penyusun. "Laporan Tahunan Tahun 2014". Padang: BPS Kota Padang, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka, 2005.
- Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah. *Pola Pembinaan Jamaah Haji*. Jakarta: Depag RI, 2006.
- Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah. *Pola Bimbingan Manasik Haji Calon Jamaah Haji*. Jakarta: Depag RI, 2007.
- Iskandar, Idy. *Pola Bimbingan Manasik Jamaah Haji, Panduan Pembimbing bagi KUA Kecamatan*. Jakarta: Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah, 2007.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Syaukani, Imam (ed). *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430H/2009M*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.
- Siagian, P Sondang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.